



KEMENTERIAN  
KESEHATAN  
REPUBLIK  
INDONESIA

# RENCANA KINERJA TAHUNAN

KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN PROMOSI KESEHATAN

Direktorat Promosi Kesehatan dan  
Pemberdayaan Masyarakat

2017



# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. LATAR BELAKANG

Pertanggungjawaban Renstra kepada masyarakat dapat dilihat dari dua jalur utama, yaitu jalur pertanggungjawaban keuangan dan jalur pertanggungjawabankinerja. Rambu-rambu jalur pertanggungjawaban keuangan sudah tertata denganapik, tetapi jalur pertanggungjawaban kinerja kurang tertata sehingga terkesantidak perlu dipertanggungjawabkan. Sebagai bagian dari manajemen kinerja, kedudukan perencanaan kinerja menjadi suatu issue yang strategis yang harus diperhatikan dan dipecahkan oleh pimpinan instansi sebagai manajer dan pemimpin yang mengarahkan instansi kepada arah pelaksanaan misi dan pencapaian visi organisasi.

Perencanaan kinerja juga merupakan tahap penting dalam melaksanakan renstra yang akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi pada pencapaian kinerja yang diinginkan. Dengan berdasarkan pada perencanaan kinerja yang baik maka pelaksanaan renstra juga dapat dipantau tingkat pencapaiannya secara lebih operasional serta dengan melihat berbagai kemungkinan dan alternatif untuk meningkatkan dan memacu pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara lebih cepat.

Menurut SK Kepala LAN Nomor 239 /IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja (renja) sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan target-target kinerja berikut kegiatan-kegiatan tahunan beserta indikator kerjanya serta penetapan indikator kinerja sasaran sesuai dengan program, kebijaksanaan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Oleh karena itu, substansi dari penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah target setting dari capaian indikator kinerja.

Dalam rangka mengoptimalkan perannya sebagai unsur pendukung pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan, Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan perlu menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan Tahun 2017 dengan mengacu pada Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019.

## **1.2. TUJUAN**

Tujuan disusunnya Rencana Kinerja Tahunan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan Tahun 2017 yaitu sebagai bahan acuan bagi perencana dan pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan, baik di Pusat maupun Daerah dalam melaksanakan urusan wajib sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan.

## **1.3. DASAR HUKUM**

- a. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- b. Peraturan Presiden No 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019
- c. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017.
- d. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- e. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015– 2019.

#### **1.4. Arah Kebijakan Sasaran Pokok Pembangunan Kesehatan**

Sesuai dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017, Tema RKP tahun 2017 adalah Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah dengan Arah Kebijakan Pembangunan Kesehatan adalah :

- Memperkuat upaya promotif dan preventif
- Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan
- Pembiayaan kesehatan.
- Penyediaan, distribusi, dan mutu sediaan farmasi, alkes, dan makanan
- Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
- Penguatan sistem informasi, manajemen dan litbang kesehatan
- Penyediaan, persebaran dan kualitas SDM kesehatan
- Mempercepat perbaikan gizi masyarakat
- Meningkatkan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi

Kebijakan terkait Revolusi Mental:

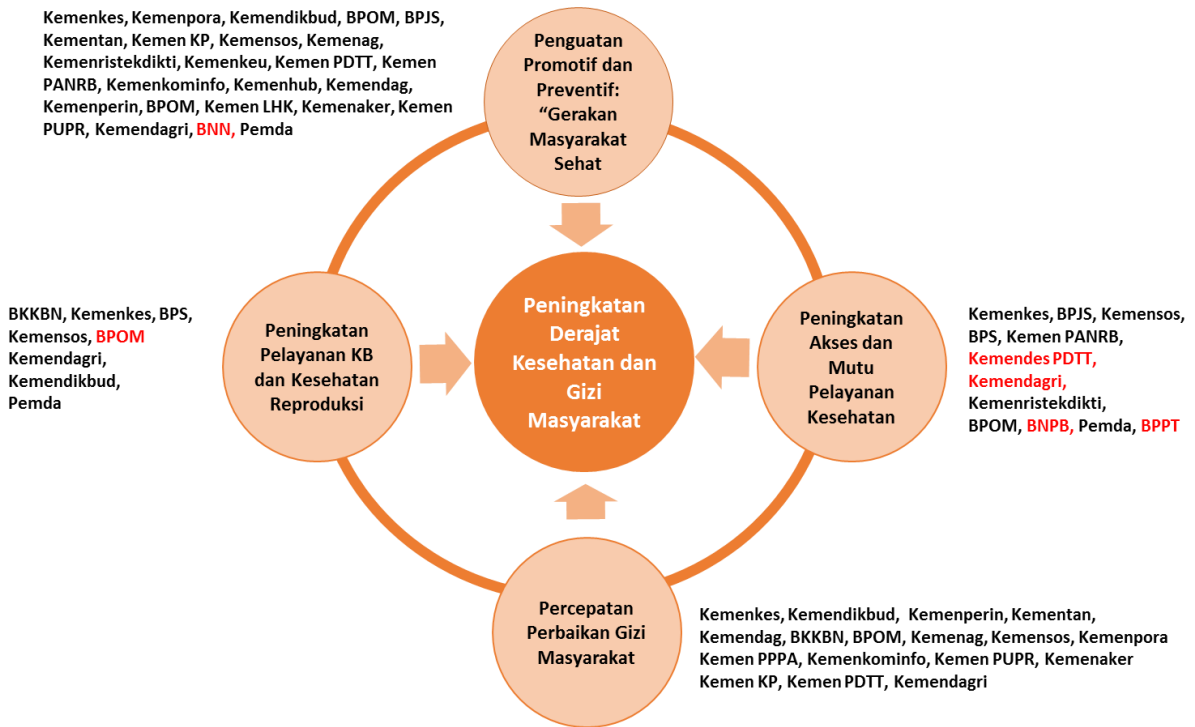
- Meningkatkan responsifitas pelayanan kesehatan
- Efektivitas program preventif (Gerakan Masyarakat Sehat)
- Penegakan hukum dan disiplin (etika kedokteran, standar rumah sakit, dll)

Sedangkan sasaran pokok pembangunan kesehatan Tahun 2017 adalah :

- Meningkatnya Status Kesehatan Ibu, Anak dan Gizi Masyarakat
- Menurunnya Penyakit Menular dan Tidak Menular
- Meningkatnya Perlindungan Finansial
- Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan

- Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan

### 1.5. PROGRAM PRIORITAS



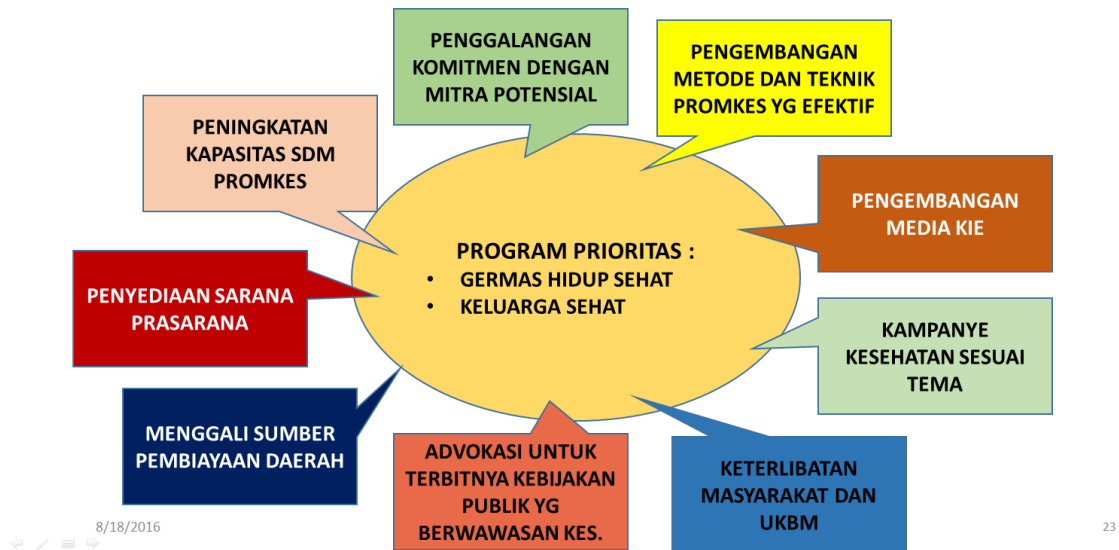
### 1.6. KEGIATAN PRIORITAS



## 1.7. KEGIATAN PROMKES

Paparan Ditjen Kesmas untuk Koordinasi Perencanaan Pusat dan Daerah Program Kesmas 2016

### KEGIATAN PROMKES DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT



## **BAB II**

### **PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **2.1. URUSAN WAJIB**

Urusan wajib Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata kerja Kementerian Kesehatan, Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumber daya promosi kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat.
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumber daya promosi kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumber daya promosi kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat.
4. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumber daya promosi kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat.
5. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumber daya promosi kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

## 2.2. PROGRAM DAN KEGIATAN

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan menjadi salah satu kegiatan dalam Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.

Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan

Sasaran Strategis : Meningkatnya pelaksanaan pemberdayaan dan promosi kesehatan kepada masyarakat

## 2.3. SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	
			Jumlah	Satuan
1	Meningkatkan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan minimal 5 tema kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	100	Kabupaten/Kota
		Persentase posyandu aktif	50	%
		Persentase desa yang mengalokasikan dana desa untuk UKBM	30	%



Adapun Definsi Operasional Indikator Kinerja Kegiatan adalah:

1. Kabupaten/Kota yang menyebarluaskan informasi minimal 5 tema kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di minimal 3 saluran media (cetak, elektronik, media luar ruang, media tradisional, dan media lainnya).
2. Posyandu yang mampu melaksanakan kegiatan utamanya secara rutin setiap bulan (KIA: ibu hamil, ibu nifas, bayi, balita, KB, imunisasi, gizi, pencegahan dan penanggulangan diare) dengan cakupan masing-masing minimal 50% dan melakukan kegiatan tambahan
3. Persentase desa yang difasilitasi oleh Puskesmas untuk memanfaatkan dana desa untuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM). Fasilitasi yang dilakukan Puskesmas adalah advokasi kepada pengambil keputusan (Kepala Desa dan tokoh masyarakat); pendamping proses perencanaan; dan monitoring pelaksanaan kegiatan untuk UKBM yang bersumber dari dana desa. Kegiatan fasilitasi Puskesmas didanai melalui BOK/DAK Non Fisik maupun sumber lain yang sah di Puskesmas

**BAB III**  
**RENCANA KINERJA TAHUNAN**

Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran dari upaya pencapaian indikator kinerja kegiatan yang dapat terukur dan merupakan hasil yang akan dicapai dalam jangka waktu satu tahun anggaran. Pada Tahun 2017 Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat menetapkan Rencana Kinerja Tahun 2017 yang merupakan penjabaran dari Renstra Kementerian Kesehatan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan sebagai berikut :

**3.1. Layanan Kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat**

No	Komponen / Sub Komponen	Target		Penanggung Jawab / Pelaksana	Ket
		Jumlah	Satuan		
1	Mengadvokasi Kebijakan PHBS				
	a. Pemantapan Advokasi Kebijakan PHBS				
2.	Bermitra (Dunia Usaha/ Ormas/Pihak Lainnya) dalam mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat				
	a. Fasilitasi Pelaksanaan MoU Kementerian Kesehatan dan Ormas	1	Laporan	Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat	KP
3	Mengembangkan Model Intervensi Promosi Kesehatan				
	a. Pengembangan Model Intervensi Promosi Kesehatan	1	Model Intervensi Promosi Kesehatan	Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat	KP

4	Menggalang Komitmen Stakeholder dalam rangka Pelaksanaan Keluarga Sehat dan Germa				
	a. Pelaksanaan Konferensi Nasional Promkes ke 7	1	Laporan	Subdit Potensi Sumber Daya Promkes	KP
	b. Sosialisasi Germas	1	Laporan	Dit. Promkes dan PM	KP
	c. Penyelenggaraan Rakornis TMMD ke 99 tahun 2017	1	Laporan	Subdit Pemberdayaan Masyarakat	KP
	d. Penggalangan Komitmen Pelaksanaan Germas di Daerah	34	Provinsi	Dekon	DK
	e. Forum Diskusi Germas di Provinsi	34	Provinsi	Dekon	DK
	f. Forum Diskusi Germas di Kab./Kota	34	Provinsi	Dekon	DK
	g. Penggerakan Massa terkait Germas di Provinsi dan Kab./Kota	34	Provinsi	Dekon	DK
5	Berkoordinasi Saka Bakti Husada				
	a. Rapat Koordinasi SBH tingkat Provinsi dan Kab./Kota	34	Provinsi	Dekon	DK
6	Mengembangkan Strategi Komunikasi Pelaksanaan Kampanye Germas				
	a. Penyusunan Strategi Komunikasi Germas	1	Dokumen	Subdit KIE	KP

7	Melakukan KIE kepada Masyarakat				
	a. Produksi Media	5	Media	Subdit KIE	KP
	b. Penyebarluasan informasi melalui Blogger	1	Laporan	Subdit KIE	KP
	c. Penyebarluasan Informasi melalui Media Luar Ruang	1	Laporan	Subdit KIE	KP
	d. Penggandaan Media Promotif dan Preventif	1	Laporan	Subdit KIE	KP
	e. Penyebarluasan Informasi melalui media elektronik	1	Laporan	Subdit KIE	KP
	f. Penyebarluasan Informasi melalui berbagai saluran komunikasi di daerah	1	Laporan	Subdit KIE	KP
7	Melakukan Bimbingan Teknis dalam rangka Pelaksanaan Keluarga Sehat dan Germas				
	a. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	1	Laporan	Dit. Promkes dan PM	KP
	b. Monitoring dan Pembinaan Peningkatan RT ber PHBS	1	Laporan	Subdit Potensi Sumber Daya Promkes	KP
	c. CSR Award Bidang Kesehatan	1	Laporan	Subdit Advokasi dan Kemitraan	KP
8	Meningkatkan Kapasitas				

	Tenaga Promkes dan Penggerak				
	a. Orientasi Materi KIE Kesehatan bagi Guru Sekolah Dasar/MI	1	Laporan	Subdit Potensi Sumber Daya Promkes	

### 3.2. Pemberdayaan Masyarakat

No	Komponen / Sub Komponen	Target		Penanggung Jawab / Pelaksana	Ket
		Jumlah	Satuan		
1	Mengaktifkan dan Menguatkan Peran Forum/ Kelompok/Ormas				
	a. Koordinasi Pokjanel Posyandu di Provinsi dan Kab./Kota	34	Provinsi	Dekon	DK
2	Mensosialisasikan dan Berkoordinasi dalam Pemanfaatan Dana Desa untuk UKBM				
	a. Pemantapan Advokasi Dana Desa untuk UKBM	34	Provinsi	Dekon	DK
3	Menguatkan UKBM				
	a. Pengadaan dan Pengiriman Dacin dan Sarung Timbangan	1	Laporan	Dit. Promkes dan PM	KP

### 3.3. Layanan Dukungan Manajemen

No	Komponen / Sub Komponen	Target		Penanggung Jawab / Pelaksana	Ket
		Jumlah	Satuan		
1	Penyusunan NSPK	2	Dokumen	Dit. Promkes dan PM	KP
2	Bimbingan Teknis Pelaksanaan Promkes di Daerah	34	Provinsi	Dit. Promkes dan PM	KP
3	Supervisi Pelaksanaan Program Prioritas	9	Lokasi	Dit. Promkes dan PM	KP
4	Fasilitasi Pimpinan	1	Laporan	Dit. Promkes dan PM	KP
5	Pelaksanaan Kebijakan Promkes dan Pemberdayaan Masyarakat	1	Laporan	Dit. Promkes dan PM	KP
6	Honorarium Pengelola Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa	12	Bulan	Dit. Promkes dan PM	KP
7	Pelaksanaan Urusan Rumah Tangga Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	12	Bulan	Dit. Promkes dan PM	KP
8	Pelatihan dan Kursus Teknis Promosi Kesehatan	50	Orang	Dit. Promkes dan PM	KP
9	Inventarisasi BMN	12	Lokasi	Dit. Promkes dan PM	KP

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Rencana Kinerja Tahunan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan Tahun 2017 merupakan penjabaran dari upaya pencapaian indikator kinerja kegiatan yang dapat terukur dan merupakan hasil yang akan dicapai dalam jangka waktu satu tahun anggaran. Dengan dokumen RKT ini diharapkan pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan sesuai dengan rencana sehingga berjalan efektif, efisien dan terukur.